

PEMAHAMAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU 2024 DI SMAN 1 SEWON BANTUL YOGYAKARTA

Arlis Prayugo*¹, Otti Ilham Khair², Rahadi Budi Prayitno³, Susiana Setianingsih⁴,
Gede Wijaya Kusuma⁵, Jovan Prima Firmansyah⁶, Agus Salman⁷
^{1,2,3,4,5,6,7}Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta
e-mail: arlisyugo@yahoo.com

Abstrak

Pemilu serentak akan digelar pada tahun 2024 tepat pada 14 Februari 2024. Praktis gelaran pesta demokrasi membuat antusiasme dikalangan para politisi berlomba-lomba dalam menggaet suara pemilih terutama pemilih pemula. Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Tapi persoalan lain yang bisa terjadi pada keikutsertaan para pemilih pemula dalam pesta demokrasi itu, mereka juga bisa berpeluang menjadi penyumbang "golput" dalam pemilu 2024. Mengingat partisipasi politik generasi muda semakin potensial untuk mencapai pemilu yang berkedaulatan dalam meraih dukungan publik. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah upaya penyadaran peran partisipasi politik pemilih pemula yang akan memandu pemilih pemula untuk memilih calon yang punya visi dan misi yang baik serta berpihak kepada kepentingan generasi muda. Adapaun metode yang digunakan adalah dengan materi sosialisasi pemahaman kepemiluan dengan diskusi dan tanya jawab di kelas, dengan melakukan pengukuran serta evaluasi melalui pretest dan post test. Dan hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi terhadap pemilihan umum, dan kesadaran akan peran partisipasi politik pemilih pemula.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula

Abstract

Simultaneous elections will be held in 2024 on February 14 2024. Practically holding a democratic party creates enthusiasm among politicians competing to attract the votes of voters, especially first-time voters. A number of surveys show that the millennial generation and generation Z are predicted to be the voter groups with the largest proportion in the 2024 election. Young voters or millennial voters are voters whose age range is between 17-37 years. In the 2024 simultaneous elections, it is predicted that the number of young voters will increase. If we look at the 2019 simultaneous elections, data from the KPU shows that the number of young voters has reached 70 million - 80 million people out of 193 million voters. This means that 35%-40% of young voters already have power and have a big influence on election results which will influence the progress of the nation. But another problem that could occur in the participation of young voters in the democratic party is that they could also have the opportunity to contribute to "abstentions" in the 2024 elections. Considering that the political participation of the younger generation has increasingly potential to achieve sovereign elections in gaining public support. The aim of this community service activity is an effort to raise awareness of the role of political participation among young voters who will guide young voters to choose candidates who have a good vision and mission and side with the interests of the younger generation. The method used is material to disseminate understanding of elections through discussions and questions and answers in class, by measuring and evaluating through pretests and posttests. And the results of the service show an increase in students' understanding and knowledge of general elections, and awareness of the role of political participation of novice voters.

Keywords: General Election, Political Participation, New Voters.

PENDAHULUAN

Peran generasi muda dalam perhelatan pemilu tentu sangat menentukan arah demokrasi dan kemajuan bangsa. Dewasa ini, pembahasan khususnya para pihak pemangku (stakeholder) tidak bisa

lepas dari fenomena pemilih pemula. Penjelasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 9 Tahun 2022 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan umum, pada Bab I, Pasal 1, angka 8 berbunyi bahwa “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Pemilih Pemula dan Pemilih muda merupakan pemilih potensial mengingat kedua pemilih tersebut disebutkan dalam Peraturan KPU pasal 28 ayat 2 poin a dan b dalam menjelaskan usaha KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kontekstualisasi demokrasi perwakilan, dimana pemerintahan mendapatkan legitimasi kekuasaan dari keterlibatan warga negara untuk mengambil keputusan politik. Jika warga negara menghindari partisipasi politik, maka sistem sosial akan kehilangan fungsi legitimasinya. Bentuk partisipasi politik beraneka ragam bentuk dan memberikan alternatif berbeda kepada warga negara. Kita berbicara tentang partisipasi, pertimbangan nilai, dan penegakan kepentingan. Bentuk partisipasi politik adalah pemberian suara pemilu, terlibat dalam partai, kampanye, pemogokan, atau inisiatif warga. Secara khusus, generasi muda diminta berkontribusi dalam politik dan mendamaikan kepentingan. Dengan demikian, jelas bahwa generasi muda yang aktif dalam politik harus memiliki keterampilan komunikatif dasar agar lebih mudah memahami aturan dan nilai. Dengan demikian Partisipasi tidak hanya sebatas bagaimana masyarakat memberikan hak suara mereka saat pemilihan umum berlangsung. Namun partisipasi berupa dalam bentuk yang lebih luas yakni, bagaimana publik terlibat dalam diskusi terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, bagaimana mereka terlibat dalam proses pembuatan keputusan, serta bagaimana mereka mengontrol pelaksanaan kebijakan dan program (Becerik, 2015; Prayudi, 2016).

Pengaruh pemilih pemula yang penting dan signifikan sudah disadari oleh partai politik peserta pemilu dan para calon kandidatnya. Suara pemilih pemula sudah di perhitungkan semenjak masa-masa kampanye awal menjelang pemilu sehingga banyak cara yang dilakukan dalam rangka menjaring suara pemilih pemula tersebut. Salah satunya adalah upaya melakukan Pendidikan politik kepada pemilih pemula karena tingkat literasi dan Pendidikan politik yang masih rendah dikhawatirkan adanya pemanfaatan kelompok tertentu yang memobilisasi suara pemilih pemula. Sebagai contoh dengan membuat arahan kepada pasangan calon tertentu dengan membawa jargon dan muatan tertentu melalui media iklan dan sosial media, tanpa memberikan pemahaman mendalam kenapa preferensi pemilihan tersebut seharusnya dilakukan oleh mereka sebagai pemilih pemula (Sukma & Wardhani, 2018).

Ada gejala yang dapat diamati secara umum dalam partisipasi politik pemilih pemula, dimana mereka merupakan kategori warga negara yang memasuki usia pertama kali mengikuti perhelatan pemilihan umum. Pemilih pemula ini belum memahami dan mencukupi pemahaman terhadap pemilihan umum sehingga potensial menjadi golput atau tidak memberikan suaranya di pemilu kedepan. Pemilih pemula juga cenderung dipengaruhi oleh orang terdekat dan lingkungan sekitarnya sehingga keterlibatan dalam pemilu sedikit banyak bukan merupakan pilihan yang didasarkan kepada pengetahuan dan kesadaran pribadi atau partisipasi yang bersifat otonom, namun partisipasi sedikit banyak bersifat mobilisasi. Sehingga memberikan pemahaman kepada mereka merupakan langkah awal dalam proses pendidikan politik yang dapat meningkatkan derajat partisipasi politik mereka sehingga partisipasi politiknya lebih bersifat otonom atas dasar pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab pribadi.

Umum di mengerti bahwa pemilihan umum merupakan sarana warga negara dalam menggunakan hak politik mereka. Lewat pemilihan umum warga negara mendelegasikan kekuasaan mereka melalui penyerahan suara kepada wakil dalam hal ini adalah mereka yang akan duduk dalam jabatan publik baik melalui jalur legislative maupun eksekutif. Inilah yang kemudian di kenal sebagai bagian dari sistem demokrasi perwakilan. Kemudian di lain sisi para pemilih juga berperan sebagai hakim dalam menentukan apakah layak seseorang dijadikan menjadi seorang pejabat publik atas kinerja mereka di masa sebelumnya dan melalui track record yang di dapatkan selama ini. Untuk sampai kepada masyarakat yang dapat menilai kinerja elite politik maka memerlukan pemahaman, dan tingkat literasi politik yang baik dari seorang warga negara.

Maka peran penyadaran dan pemahaman mesti dilakukan baik oleh elemen negara, akademisi, masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan pemahaman dan literasi politik agar partisipasi politik lebih bersifat otonom. Dan tidak mudah terjebak dalam demokrasi transaksional dan pragmatisme politik yang cenderung membeli suara rakyat dengan uang dan memundurkan sistem demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum dalam negara demokrasi memiliki beberapa fungsi yang lazim di ketahui yakni (1) Sebagai sarana pembentuk legitimasi dan pemberian kewenangan serta kekuasaan kepada pemerintahan; (2) membentuk sarana perwakilan politik bagi warga negara; (3) terbentuknya sirkulasi

elite yang sehat melalui jalur formalitas; (4) sarana Pendidikan politik yang seharusnya juga menjadi bagian dari fungsi partai politik; dan (5) sebagai sarana partisipasi warga negara dalam politik. Partisipasi politik adalah sebuah aspek penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di mana partisipasi politik menggambarkan keterlibatan warga negara dalam menentukan kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka. Dan ini adalah ciri dari sebuah negara dengan modernisasi politik yang sehat. Karena setiap keputusan politik yang di buat dan dilaksanakan oleh penmerintah akan senantiasa menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negaranya, oleh sebab itu warga negara berhat untuk menentukan keputusan dan kebijakan politik yang akan dibuat.

Permasalahan partisipasi politik di Indonesia pasca reformasi mengalami pasang surut. Meski demikian optimisme dari berbagai pihak terutama elemen masyarakat sipil atas perubahan signifikansi partisipasi politik yang bersifat di mobilisasi kepada partisipasi politik yang bersifat otonom menunjukkan kepada perkembangan yang positif. Namun secara factual hal demikian belum dapat sepenuhnya terwujud. Misalnya kita dapat sajikan sebuah informasi pada tahun 2004 tingkat partisipasi pemilih hanya sebesar 84,1%, lebih rendah jika dibandingkan dengan pemilu tahun 1999 yang mencapai 92,6%. Tingkat partisipasi pemilih juga semakin menurun pada pemilu 2009, menjadi 70,9%, disertai dengan peningkatan jumlah warga yang tidak menggunakan hak memilihnya sebanyak 29,1%. Demikian juga pada pemilu tahun 2014 yang hanya mencapai tingkat partisipasi sebesar 70%, sednagkan pada tahun 2019 tingkat partisipasi pemilih mencapai 82% (Ramadhanil et al., 2015).

Rendahnya partisipasi politik menjadi permasalahan yang terus di perbaiki oleh berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, penyelenggara pemilu, organisasi kemasayarakatan yang tergabung dalam gerakan masyarakat madani, serta organisasi masyarakat peduli pemilu. Secara umum dapat dilihat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, yakni sebut saja rendahnya tingkat kepercayaan (trust) terhadap partai politik, rendahnya identitas terhadap partai, serta kurang dekatnya kandidat peserta pemilu dengan masyarakat. Menguatnya politik "reward" yang mendorong masyarakat untuk memilih dengan syarat tertentu. Seperti politik uang, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak politik, lahirnya media partisan, polarisasi politik akibat beranekaragam konflik kepentingan. Menurunnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat di pengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap isu-isu politik dan jenuhnya proses demokrasi yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup warganya. masyarakat masih berkeyakinan bahwa sistem politik bukalah urusan mereka, tetapi urusan pemerintah. Mereka yang terpilih diyakini tidak benar-benar dan sungguh memperjuangkan nasib rakyat, melainkan memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekuasaannya. Hingga pada akhirnya akumulasi kekecewaan terhadap realitas politik yang dirasakan berujung pada terbentuknya sikap apatis terhadap politik (Yanuarti, 2016 & Husna, 2021).

Untuk pemilih pemula sendiri ada beberapa hal yang membuat mereka tidak tertarik kepada politik. Pertama, menurut mereka politik belum mampu menjawab permasalahan serta refleksi kebutuhan kaum muda, kemudian yang kedua kaum muda merasa keterlibatan mereka dalam politik masih terbatas dan belum terwakili dengan baik. Mereka sadar bahwa peran mereka masih sering dijadikan sebagai objek politik dan tujuan kepentingan politik ketimbang dijadikan subjek dalam politik. (Quintelier, 2007).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Pendidikan politik khususnya generasi muda. Pendidikan politik atau yang di sering di sebut politikche bildung merupakan upaya untuk melibatkan warga negara guna menciptakan budaya partisipasi. Melalui Pendidikan politik, informasi diberikan kepada warga negara sehingga terjadi proses transfer nilai dan norma meskipun tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu (Handoyo et al., 2017). Fungsi dan tujuan Pendidikan politik antara lain; (1) menciptakan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya daam fungsi sosial dan politik; (2) membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik; (3) meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, tanggung jawab, dan etika mengenai politik; dan (4) mendorong lebih tingkat derajat partisipasi politik aktif masyarakat (Affandi, 2011). Pendidikan politik juga dapat dipahami sebagai usaha memberikan pengajaran, pelatihan dan pembimbingan dalam rangkapengembangan potensi serta kapasitas seorang. Melalui proses dialogis dilakukan dengan sukarela antara pemberi informasi dan penerima informasi. Dari kegiatan tersebut muncul pemahaman dan kesadaran dalam kehidupan berdemokrasi. Pendidikan politik demikian memiliki tiga unsur penting, yakni ; pertama : adanya perbuatan memberi pelatihan, pengajaran, serta membimbing dalam pemahaman. Kedua, kegiatan pemberian pemahaman tersebut dapat secara dialogis dilakukan secara sukarela, kemudian yang ketiga, kegiatan tersebut agar si

penerima pesan dapat terbangun kesadaran dan pemahaman peran individu dan keterlibatannya dalam kehidupan berdemokrasi (Istikharah, 2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat ada 5 ribu lebih calon pemilih pemula untuk pemilu 2024. Namun data pastinya masih akan dipastikan saat pemutakhiran yang dimulai bulan depan. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY Ahmad Shidqi menjelaskan data sementara calon pemilih untuk pemilu 2024 ada 2.675.147 orang. Data itu masuk kategori daftar pemilih berkelanjutan (DPB) yang tercatat pada Semester I Tahun 2022. "Pemutakhiran data pemilih akan dimulai pada Oktober 2022. Dasarnya menggunakan DPB (Sumber : <https://www.medcom.id/nasional/daerah/eN4q38ob-5-739-orang-di-diy-jadi-calon-pemilih-pemula-pemilu-2024>).

Melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi pemilih pemula di wilayah Daerah Khusus Yogyakarta memang sangat potensial dalam mendukung Pemilu yang berintegritas dan berdaulat. Integritas dan berdaulatnya pemilu bisa dilihat dari tingkat partisipasi warga negara dalam keterlibatan pemilihan para pimpinan elit politiknya. Sesuai dengan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada pemilih pemula di usia sekolah dalam menghadapi pemilihan umum 2024. Dimana kegiatan ini dilakukan di salah satu SMA di wilayah Yogyakarta, dan kegunaan kegiatan penelitian ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemilih pemula terkait kepemiluan, baik dalam hal informasi seputar peserta pemilu, tata cara memberikan suara, dan mekanisme pemilihan suara. Serta upaya apa saja yang dapat dan bisa dilakukan dalam memantau dan mengawasi adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. Sehingga kegiatan PKM ini dapat mengarahkan para pemilih pemula untuk dapat berpartisipasi seoptimal mungkin dalam keterlibatannya di dalam pemilu 2024.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini pada hari Jumat, 8 Maret 2024 pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB. Mitra kegiatan pengabdian masyarakat ini bertempat di SMAN 1 Sewon, Jl. Parangtrirtis KM 5, Sewon, Bantul, Yogyakarta, DIY, Jawa Tengah. Target dan sasaran adalah siswa-siswi kelas XI dan XII IPA dan IPS SMAN 1 Sewon, Yogyakarta. Teknik pengumpulan data terhadap siswa-siswi dilakukan melalui kuesioner tertutup. Pada tahap selanjutnya kegiatan pengabdian masyarakat dengan rencana kegiatan sosialisasi dan Pendidikan politik terhadap Pemilih Pemula di Pemilu 2024. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam dua sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi diskusi dilanjut dengan sesi tanya jawab. Pada sesi diskusi dan tanya jawab juga dilakukan kegiatan evaluasi siswa dalam bentuk pretest dan post test untuk mengukur tingkat pemahaman siswa akan Pemilu 2024 dan Partisipasi Politik. Evaluasi merupakan pengukuran terhadap hasil capaian (Winkel, W, 1983). Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan tafsir data menggunakan deskripsi besaran presentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilih pemula di SMA 1 Sewon Yogyakarta di lakukan dengan memberikan materi pemahaman mengenai kepemiluan. Dalam kegiatan di kelas dilakukan pemahaman dengan pemaparan materi serta diselingi dengan diskusi interaktif. Para siswa sebagai pemilih pemula di ajak menonton ilustrasi dan info grafis seputar kepemiluan. Seperti pengenalan partai peserta pemilu, kapan waktu pemilu dan masa waktu kampanye, serta seputar pemahaman partisipasi politik. Peserta dalam hal ini siswa di ajak untuk memahami apa itu politik uang dan cara menghindarinya, hoaks, hingga kampanye gelap. Peserta di ajak untuk memahami bagaimana peserta pemilu yang seharusnya mampu membawa perubahan kearah positif dalam pembangunan bangsa. Tujuan adari hal tersebut melahirkan kesadaran kolektif para pemilih pemula yang memilih berdasarkan kepada rasionalitas, moral dan penuh tanggung jawab.

Kemudian para pemilih pemula tersebut di ajak untuk interaktif dalam menjawab beberapa pertanyaan dan di beri kesempatan untuk menjelaskan terkait materi kepemiluan yang telah diberikan dan juga dengan beberapa game interaktif dengan hadiah sebagai reward bagi mereka yang dapat menjawab dengan benar. Diskusi dan game interaktif juga menunjukkan aspek kepemimpinan, public speaking, dan kepribadian mereka. Secara tidak langsung para pemilih pemula dilatih untuk berpendapat dan mengemukakan pendapat. Ini juga sebagai bentuk upaya melatih para pemilih pemula dapat memilih pemimpin dan calon legislatif melalui partisipasi kritis dengan cara cerdas agar mereka dapat terhindar dari politik mobilisasi serta politik uang dan kampanye negative.



Gambar 1. Paparan oleh Dosen

Kegiatan pemahaman dan Pendidikan politik berlangsung kurang lebih 120 menit berlangsung dengan lancar dan menyenangkan. Para peserta terlihat sangat antusias dan yang terpenting dari itu hasil evaluasi melalui post test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap kepemiluan dibandingkan dengan hasil pretest sebelum dilakukan kegiatan pemahaman mengenai kepemiluan. berikut akan dijelaskan beberapa hasil kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman siswa terhadap kepemiluan dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik mereka.

Tingkat Pengetahuan Siswa mengenai waktu penyelenggaraan Pemilu 2024

Berdasarkan hasil kegiatan pemahaman siswa dengan tema partisipasi pemilih pemula di pemilu 2024 dan pengamatan di kelas yang diikuti oleh 31 siswa siswi kelas XI IPA dan IPS SMAN 1 Sewon Yogyakarta yang dilakukan melalui kegiatan pretest- posttest, tanya jawab, games dan diskusi. Berikut data hasil pretest dan posttest jawaban siswa terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan pretest diawali dengan mengajukan pertanyaan seputar kapan waktu Pemilihan Umum 2024 akan dilaksanakan, berdasarkan hasil pretest dan posttest dapat disajikan kedalam diagram berikut ini;

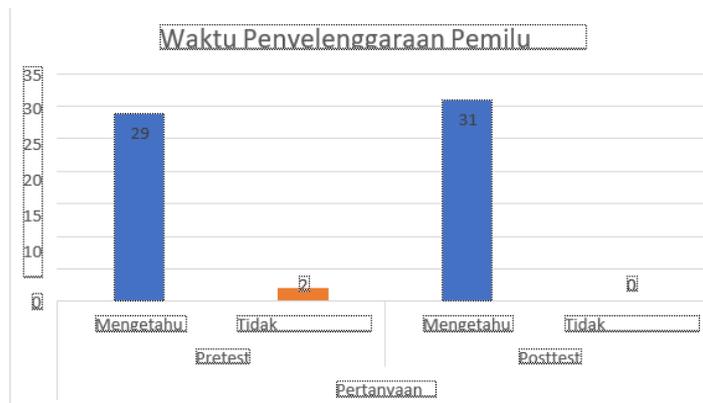


Diagram 1. Pemahaman terhadap Waktu Penyelenggaraan Pemilu 2024

Berdasarkan diagram tersebut diketahui hampir Sebagian besar siswa-siswi telah mengetahui kapan waktu pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan jumlah siswa menjawab benar sebanyak 29 orang dari 31 orang dengan persentase 93.5%. dan yang menjawab salah hanya 2 orang saja yakni dengan persentase 6.45% dari keseluruhan siswa. Setelah di lakukan pemahaman di kelas maka hasil posttest menunjukan keseluruhan siswa sebanyak 31 orang telah mengetahui kapan waktu pemilu di lakukan. Dari hasil pretest ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa memang telah baik sebelum dilakukan kegiatan ini, yang di peroleh dari persebaran informasi media informasi seperti media sosial, TV, Radio dan internet yang mereka dapatkan di luar sekolah.



Gambar 2. Pemberian Pre Test

Tingkat Pengetahuan Siswa Mengenai Jumlah Partai Peserta Pemilu 2024

Pertanyaan berikutnya adalah mengukur seberapa jauh pemahaman peserta terkait jumlah partai peserta pemilu secara nasional pada pemilu 2024.

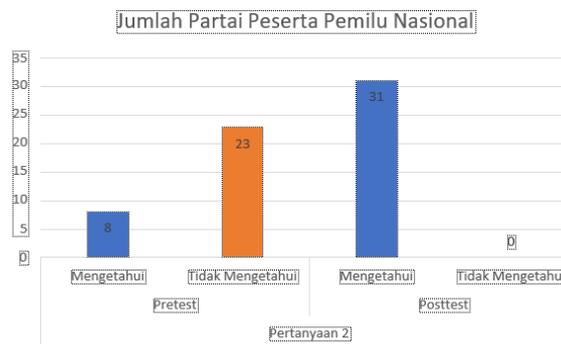


Diagram 2. Pemahaman terhadap Jumlah Partai Peserta Pemilu Nasional

Dari hasil pretest yang dilakukan hanya sebanyak 8 orang saja yang mengetahui jumlah partai peserta pemilu 2024 yakni dengan persentase 25.80 %, sedangkan siswa yang tidak mengetahui jumlahnya yang terbanyak sebanyak 23 orang dengan persentase 74.19%. setelah di lakukan pemahaman dikelas maka seluruh siswa sejumlah 31 orang melalui hasil Post test dapat mengetahui berapa jumlah partai peserta pemilu di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum di lakukan kegiatan pemahaman siswa mengenai jumlah partai peserta pemilu masih sangat kurang dan di mungkinkan sekali informasi dan literasi mereka sangat terbatas yang didapatkan di luar kelas.

Tingkat Pengetahuan Siswa Mengenai Jumlah Paslon Capres dan Cawapres Peserta Pemilu 2024

Pertanyaan berikutnya dalam pretes adalah untuk mengetahui informasi pemahaman siswa terhadap jumlah calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti kontestasi di Pemilu 2024. Berikut di sajikan dalam diagram dibawah ini ;

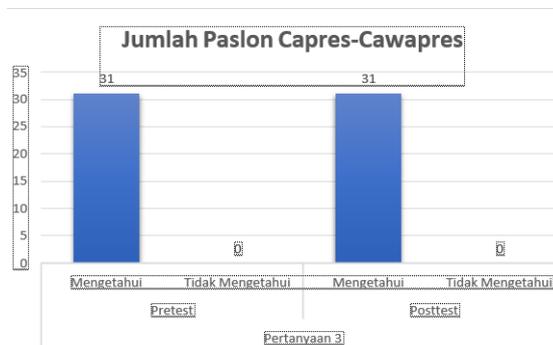


Diagram 3 Pemahaman terhadap Jumlah Paslon Capres – Cawapres

Dari hasil pretest yang dilakukan di kelas maka dapat disimpulkan seluruh siswa sebanyak 31 orang dengan persentasi 100% telah mengetahui jumlah Paslon capres dan cawapres yang akan mengikuti kontestasi di Pemilu 2024. Begitupun hasil Posttest menunjukkan hasil yang sama sebanyak 31 orang dengan persentase 100% telah mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang di dapatkan siswa sebelum kegiatan pemahaman dilakukan di kelas sudah sangat baik. Informasi

kandidasi Capres dan Cawapres memang sangat masif ketersediaan informasinya di media-media sosial, elektronik dan media massa. Bahkan media-media baliho sekalipun yang sangat dekat keberadaannya di lingkungan masyarakat bertempat tinggal.



Gambar 3. Suasana Kelas

Tingkat Pengetahuan Siswa Mengenai Waktu Kampanye Pemilu 2024

Berikutnya di ajukan pertanyaan kepada siswa melalui pretest mengenai lama masa kampanye pada Pemilu 2024 yang di berlakukan menurut Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hasilnya di tunjukkan melalui diagram dibawah sebagai berikut ;

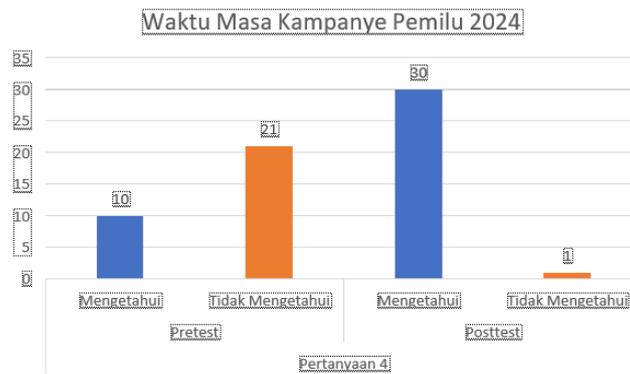


Diagram 4. Pemahaman terhadap Masa Kampanye Pemilu 2024

Dari hasil pretest yang dilakukan terhadap 31 orang siswa siswi hanya sebanyak 10 orang saja yang menjawab benar dengan persentase sebesar 33.33%, sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 21 orang dengan persentase sebesar 67.74% mengenai masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari berdasar Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Ini menyimpulkan bahwa informasi yang di peroleh siswa sebelum di lakukan kegiatan sangat minim dan kurang. Mengingat ini bagian informasi yang sebetulnya sangat sedikit menjangkau masyarakat pada umumnya, karena informasi ini lebih banyak dilakukan kepada penggiat politik maupun peserta pemilu itu sendiri seperti partai dan pengurus partai. Namun setelah dilakukan pemahaman di kelas jumlah yang mengetahui meningkat sebanyak 30 orang dengan persentase 96.77%. Dan hanya 1 orang saja yang tetap tidak mengetahui dengan persentase sebesar 3.22%, hal ini bisa di karenakan siswa kurang memahami dengan baik materi pemahaman yang di berikan di kelas.

Tingkat Pengetahuan Siswa Mengenai Batas Usia Peserta Pemilu 2024

Berikutnya di ajukan pertanyaan mengenai batas usia dapat mengikuti Pemilu 2024 untuk pertama kalinya, dari hasil Pretest dan Post test yang dilakukan dapat di lihat melalui di agram dibawah sebagai berikut ini ;



Diagram 5. Pemahaman Terhadap Usia Awal Hak Pilih Pemilu 2024

Dari hasil terhadap pretest yang dilakukan maka disimpulkan bahwa pengetahuan siswa terhadap batas usia minimal untuk dapat mengikuti Pemilu 2024 sudah sangat baik sekali. Hal ini terlihat dari semua siswa yang menjawab dengan benar sebanyak 31 orang dengan persentase 100%, dan kemudian hasil post test menunjukkan hasil yang sama pula. Ini menunjukkan bahwa informasi yang di peroleh siswa siswi sudah sangat baik sebelum kegiatan pemahaman kelas di lakukan. Ini juga menunjukkan bahwa informasi batas usia kepesertaan dalam pemilu merupakan hal yang sangat masif dan berulang pada tiap tahunnya, sehingga informasi ini mudah di cerna oleh setiap keluarga dan masyarakat di Indonesia pada umumnya.

Tingkat Pengetahuan Siswa Mengenai Kepanjangan KPPS

Berikutnya di ajukan prtanyaan seputar kepanjangan dari singkatan KPPS ini untuk mengukur seberapa besar pemahaman kepemiluan siswa-siswi di kelas terhadap penyelenggaraan pemilu di masyarakat. Hasilnya dapat di lihat melalui diagram dibawah ini sebagai berikut;

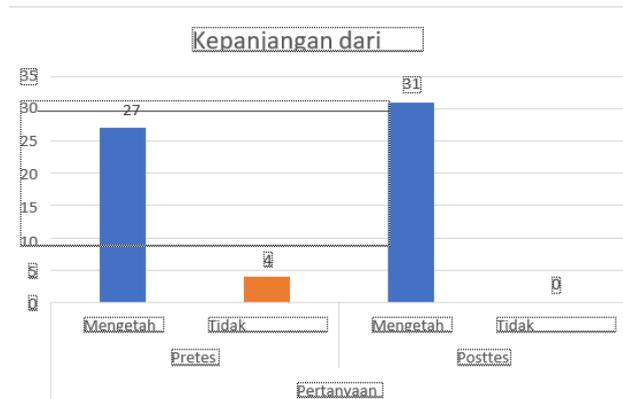


Diagram 6. Pemahaman dari kepanjangan arti KPPS

Dari hasil pretest yang dilakukan terlihat sebanyak 27 orang telah mengetahui apa kepanjangan dari KPPS sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yakni dengan persentase sebesar 87.09%. sedangkan siswa yang belum mengetahui hanya sebanyak 4 orang saja, yakni dengan persentase sebesar 12.90%. kemudian setelah di lakukan pemahaman di kelas dan hasil post test menunjukkan bahwa seluruh siswa telah memahami apa kepanjangan dari KPPS yakni sebanyak 31 siswa dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan pemahaman di kelas mampu memberikan pemahaman kepada siswa terkait hal tersebut.

Tingkat Pengetahuan Siswa Mengenai Pengertian Partisipasi Politik

Kemudian Tim PKM mengajukan pertanyaan seputar Partisipasi Pemilu dimana para siswa-siswi di ajukan pertanyaan seputar keikutsertaan seseorang dalam pemilu bisa disebut sebagai apa, dan hasil jawabannya dapat di lihat melalui diagram berikut dibawah ini ;

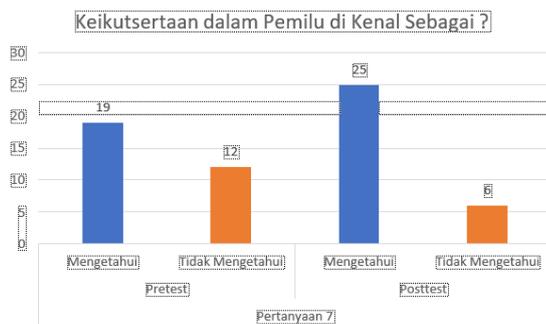


Diagram 7. Pemahaman terhadap arti dari Partisipasi Politik

Hasil pretest menunjukkan hanya 19 orang saja yang memahami bahwa keikutsertaan dalam pemilu di sebut sebagai Partisipasi Politik, dengan kisaran presentase sebesar 61.29%. Sedangkan siswa yang tidak mengetahui sebanyak 12 orang dengan persentase 38.70%. Setelah di berikan pemahaman di kelas maka jumlah siswa yang bertambah pengetahuannya melalui Posttest yang dilakukan yakni sebanyak 25 orang dengan persentase sebesar 80.64%, sedangkan yang masih belum mengetahui sebanyak 6 orang saja yakni dengan persentase 19.35%. Dapat dilihat terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari siswa siswi terhadap pengertian partisipasi politik, dimana keterlibatan seseorang dalam memberikan suara di Pemilihan Umum merupakan bentuk derajat partisipasi politik, meskipun demikian menurut (Rush dan Althoff : 2003) derajat partisipasi politik demikian masih dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang rendah.

Dalam diskusi pemahaman siswa juga di berikan pengetahuan oleh pembicara bahwa sebenarnya derajat partisipasi seseorang dapat di tingkatkan melalui pelibatan aktif diri dalam organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi kepentingan (interest group) dan penekan (pressure group) dan organisasi politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan.

Tingkat Pengetahuan Siswa Mengenai Fungsi Partai Politik

Kemudian pertanyaan berikutnya adalah menanyakan kepada para siswa apa yang dimaksud fungsi dari partai politik. Dari hasil pertanyaan ini, menghasilkan jawaban yang agak unik mengingat hasil pretest dan post test yang sedikit tidak konsisten. Dimana hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap fungsi partai politik belum cukup baik melalui kegiatan pemahaman di kelas. Bisa dilihat melalui diagram di bawah ini ;

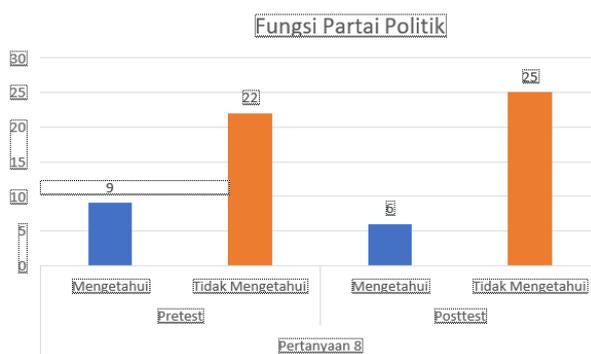


Diagram 8. Pemahaman terhadap Fungsi Partai Politik

Awal pretest menunjukkan bahwa ada 9 orang siswa yang menjawab dengan benar mengenai fungsi partai politik dengan persentase sebesar 29.03%, sedangkan yang menjawab salah sebanyak 22 orang dengan persentase 70.96%. Kemudian setelah di lakukan pemahaman malah siswa yang mengetahui hanya sebanyak 6 orang dengan persentase 19.35%, sedangkan yang menjawab salah sebanyak 25 orang dengan persentase sebesar 80.64%. Diagram menunjukkan ketidak konsistenan jawaban siswa, menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap fungsi dan peran partai politik belum cukup baik dan memadai.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemahaman di kelas belum cukup efektif untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai fungsi partai politik.

Tingkat Pengetahuan Siswa Mengenai Sikap Menghadapi Pemilu

Selanjutnya diajukan pertanyaan kepada siswa mengenai sikap yang seharusnya Ketika menghadapi pemilu. Dari hasil jawaban menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap sikap ini

menunjukkan kekonsistenan dengan hasil pretest dan posttest yang sama, dan disimpulkna bahwa pengetahuan dan pemahaman siswa atas sikap yang diinginkan telah cukup baik. Dapat dilihat melalui diagram berikut ini ;



Diagram 9. Pemahaman terhadap Sikap menghadapi Pemilu

Dari hasil pretest dan posttest menunjukkan jawaban yang konsisten dan benar dimana sebanyak 31 siswa dengan persentase 100% menjawab jawaban yang sama dan benar.

Tingkat Pengetahuan Siswa Mengenai Sikap dan Harapan terhadap Pemilu

Kemudian pertanyaan terakhir diajukan mengenai perihal sikap seseorang yang seharusnya dimiliki terhadap harapan pemilu bagaimana. Hasil diagram menunjukkan sebagai berikut ini ;

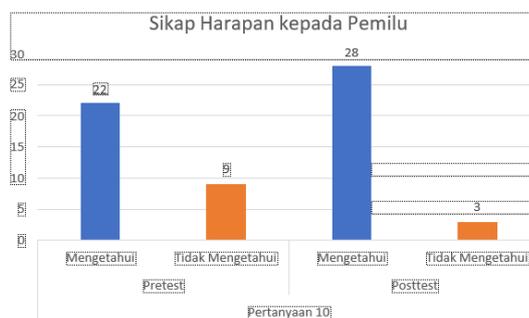


Diagram 10. Pemahaman sikap terhadap harapan Pemilu

Hasil pretest tersebut menunjukkan sebanyak 22 orang telah mengetahui bagaimana sikap yang seharusnya muncul dari seseorang dalam memandang harapan kepada pemilu yakni harus optimistis yakni dengan persentase sebesar 70.96%, sedangkan yang belum mengetahui sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 29.03%. kemudian setelah diberikan pemahaman di kelas terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai sikap yang mesti dikembangkan dalam menghadapi pemilu yakni sebanyak 28 orang menjawab benar dengan persentase sebesar 90.32%, sedngkan yang masih belum mengetahui sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 9.67%. Hasil demikian menunjukkan bahwa pemahaman yang di lakukan di kelas cukup memberikan pemahaman dan pengertian kepada siswa.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 mulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dengan judul kegiatan Pemahaman Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilu 2024. Kegiatan tersebut telah dinilai membawa manfaat bagi siswa dalam meningkatkan pemahaman dan literasi politik generasi muda. Siswa sebagai pemilih pemula dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan ke pemilu sehingga dapat meningkatkan derajat partisipasi politik dalam rangka menentukan arah kemajuan bangsa dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan nasional. Dan kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan keberhasilan kegiatan ini terlihat dengan antusiasme serta komunikasi dialogis antar siswa dan TIM pelaksana yang mana kegiatan tersebut meningkatkan pemahaman siswa dalam konteks ke pemilu 2024. Dengan hasil yang dicapai TIM Pelaksana kegiatan melihat ada peningkatan pada pengetahuan dan pemahaman terhadap materi yang telah di berikan dengan membandingkan hasil pre-test dan Post-test. Diperlukan juga sosialisasi berkelanjutan dengan memberikan pemahaman kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah. dan melibatkan lebih banyak lagi

para siswa yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemahaman mengenai partisipasi politik dan penggunaan hak politik secara bijak, dan bertanggung jawab. Sosialisasi yang luas akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran peran partisipasi politik pemilih pemula yang akan berdampak terhadap pertumbuhan kehidupan Demokrasi yang baik, dimana keterlibatan pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal potensial dalam mewujudkan pembangunan yang berkemajuan.

Laporan ini hanya membatasi pembahasan dalam aspek partisipasi politik pemilih pemula sebagai bagian dari laporan hasil pengabdian kepada masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024. Partisipasi politik merupakan terminologi yang selalu menarik untuk didiskusikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini terkait dengan fenomena bahwa partisipasi politik masyarakat mengalami dinamika yang fluktuatif serta variatif.

SARAN

Kegiatan ini memerlukan aktifitas yang berkelanjutan antara pihak kampus dengan sekolah, sehingga solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu menjadi solusi serta dapat dimaksimalkan oleh pihak mitra yang bekerjasama dengan dosen yang melakukan kegiatan pengabdian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua STIPAN yang telah memberi dukungan finansial terhadap kegiatan pengabdian ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaporan serta penulisan jurnal PKM ini, terutama untuk rekan-rekan TIM P2PM Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta yang telah membantu dalam rangka merealisasikan kegiatan sampai dengan kepada pelaporan dan penulisan jurnal PKM. Juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan dosen di Prodi Ilmu Politik dan juga Prodi Ilmu Pemerintahan. Dan ucapan terimakasih juga di sampaikan kepada kepada para mahasiswa STIP-AN yang telah terlibat dalam kegiatan PKM dan kepada pihak sekolah SMAN 1 Sewon Yogyakarta baik siswa, guru dan Kepala sekolah beserta jajarannya. Semoga kegiatan serupa akan senantiasa terwujud menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi bagi masyarakat luas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Becerik, Ö. (2015). Civic education and learning democracy: their importance for political participation of young people. 174(286), 544–549. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.703>
- Handoyo, E., Semarang, U. N., & Income, M. (2017). Pendidikan Politik (Issue November).
- Husna, A. (2021). APATISME POLITIK PEMILIH PEMULA DAN PAPARAN DRAMA KASUS KORUPSI. *Jurnal Source Ilmu Komunikasi* · February 2019, April. Istikharah, A. (2019). PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT SEBAGAI. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 314–328.
- Prayudi. (2016). DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka-Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur) (Community ' s Political Participation in Natural Resources Management: Study on Public Consu. 7(23), 48.
- Quintelier, E. (2007). Differences in political participation between young and old people. 13(2).
- Ramadhanil, F., Junaidi, V., Pramono, S., & Widyastuti, R. (2015). DESAIN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANTAUAN PEMILU (S. Pramono & R. Widyastuti (eds.)). *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*.
- Sukma, P., & Wardhani, N. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan*. 10(1), 57–62.
- Yanuarti, S. (2016). Golput dan Pemilu di Indonesia systematic intimidation by government to create victory for Soeharto regime While the increasing number of non voting behavior Golput in 2004 election was caused by people s disappointment to political institution of the gen. 48(3).